

# Harapan untuk Risma dan Bambang

*ONLY true leader can transform our society* (Dennis Fisher). Pasangan Tri Rismaharini-Bambang Dwi Hartono bakal memimpin Kota Surabaya lima tahun mendatang. Berdasarkan data KPU Surabaya, Risma-Bambang unggul dengan selisih 30.671 suara dari pesaing terdekat, Arif Afandi-Adies Kadir (Cacak). Risma-Bambang mengumpulkan 358.187 suara (38,52 persen). Cacak meraih 327.516 suara (35,23 persen).

Apa harapan warga Kota Surabaya kepada Risma dan Bambang? Sebagai warga yang terkenal kritis dan guyub, warga Surabaya tentu mendambakan pemimpin yang bebas dari korupsi dan idealis. Komunitas warga yang kritis lazimnya klop dengan pemimpin yang idealis. Birokrat yang terbiasa korupsi tidak menyukai pemimpin yang bersih dan idealis.

Warga yang kritis dan idealis biasanya tidak disukai pemimpin, yang cenderung devian (suka menyimpang dari hukum dan etika). Sikap kritis warga akan menjadi ancaman serius bagi kepemimpinannya. Pemimpin yang devian, biasanya, berusaha membangun sistem (aturan dan kebijakan) yang bisa membuat dirinya bebas untuk melakukan penyirnpangan.

## Transformator

Karena itu, kita berharap, wali kota terpilih menjadi panutan moral bagi warga kota. Dalam kepemimpinannya, dia menggandeng setiap elemen birokrat dan masyarakat yang anti-korupsi untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Birokrat yang idealis di Pemkot Surabaya tidak perlu diposisikan sebagai musuh atau duri dalam daging. Mereka harus dijadikan kekuatan dalam membangun



O I e h

DR AUGUSTINUS SIMANJUNTAK\*

*clean and good government.*

Sudah saatnya idealisme penataan kota juga berada di tangan pemimpin. Gerakan moral tidak hanya bergulir secara bottom up. Berbagai ketimpangan dan kesemrawutan kota saatnya bergulir dari atas ke bawah (top down): Pemimpin kota memiliki kedudukan strategis dalam mengoreksi kesalahan cara berpikir bawahan dan warga. Terutama, kesalahan dalam situasi birokrasi yang cenderung korup.

Wali kota berperan dalam pembentukan aparatur pemerintah yang berjiwa pengabdian dan sederhana. Motonya adalah say no to corruption. Selain itu, pemimpin perlu menyegarkan pemikiran warga kota melalui pernyataan yang membangun. Pemyataannya selalu memberikan pencerahan dan penegeuhan bagi warga. Pemimpin bukan sekadar perumus atau pelaksana teknis pemerintahan, melainkan pendidik warga.

Tingginya intelektualitas seorang pemimpin tidak menjamin profesionalitasnya. Banyak kasus korupsi di negeri ini, termasuk di Surabaya, yang justru melibatkan kaum intelek. Pejabat publik yang intelektual tanpa kerendahan hati (low profile) dan kebijaksanaan (wisdom) justru akan berbahaya

bagi masyarakat. Intelektualitas yang tinggi itu bisa disalahgunakan untuk menipu negara (daerah yang dipimpin). Caranya, membelokkan hukum, korupsi, dan mengeksploitasi lingkungan.

Pejabat kota yang hanya mengandalkan intelektualitas tanpa menyadari bahwa terdapat standar bijak yang lebih tinggi (ajaran Tuhan, pandangan tokoh moralis, dan hati nurani rakyat) tergolong pejabat yang tidak bijak. Dia hanya mengukur kebijakan politik lewat standar diri dan keinginan partai politik (parpol) yang mengusung dirinya. Ragam strategi akan ditempuh dalam meraih keuntungan dari jabatannya dengan mengerahkan kekuatan parpol pengusung di badan legislatif (DPRD).

Ada tradisi yang berbahaya. Yakni, penggantian sumber daya (dana) yang dikerahkan sang wali kota selama masa kampanye sekaligus kewajiban mengisi kas parpol yang mengusung. Itu memang dampak buruk dari sistem politik yang menjadikan parpol bayaran sebagai sarana personal branding bagi calon wali kota yang tidak dikenal masyarakat. Karena itu, saat menjabat, dia perlu kepintaran lanjutan untuk meraih pendapatan yang sebesar-besarnya.

Si pejabat mungkin tidak melakukan hal tersebut sendiri secara langsung. Parpol pengusungnya di kota ini bisa saja melakukan jejaring rente dengan kalangan pengusaha untuk mendanai parpol dengan berbagai janji. Fenomena semacam itu memang tidak mudah terdeteksi. Sebab, permainan tersebut biasanya dilakukan secara rapi dan terselubung.

Akibatnya, secara tidak langsung, kebijakan publik yang dikeluarkan wali kota bersifat diskriminatif. Akibatnya, timbul persaingan

usaha dan pertumbuhan ekonomi yang tidak sehat. Semoga wali kota terpilih terhindar dari perilaku politik birokrasi yang demikian. Kota ini tidak hanya butuh pemimpin yang pintar, tapi pemimpin juga yang bijaksana.

## Pemimpin yang Adil

Sebagai kota yang berpenduduk majemuk, Surabaya membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga keseimbangan berbagai kekuatan sosial ekonomi di dalam masyarakat. Struktur ekonomi Surabaya yang perlu dibangun adalah sinergi peran sektor publik dan swasta.

Kebutuhan swasta akan pelayanan publik bisa dipenuhi profesionalitas manajemen pemerintahan kota. Kemajuan swasta bisa memacu pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas produk, dan semakin luasnya lapangan kerja. Pemkot perlu menghindari kebijakan ekonomi yang bersifat pragmatis. Sebab, hal itu justru akan menimbulkan ketidakjelasan arah kota serta melahirkan berbagai persoalan yang pelik dan rumit. Misalnya, kemiskinan, kemacetan, dan pencemaran lingkungan.

Negara tanpa hukum ibarat tubuh tanpa tulang. Wali kota terpilih diharapkan mampu mendorong aparat hukum di daerahnya untuk mengusut kasus-kasus korupsi yang belum terungkap atau belum tuntas. Pemkot juga perlu memberantas berbagai pungutan liar terhadap dunia usaha agar tidak menjadi beban bagi pengusaha Surabaya. Sebab, frak tersebut bisa berdampak terhadap harga barang/jasa yang diproduksi dan upah pekerja. (\*c12/mik)

\*) Dosen Program Manajemen Bisnis FE Universitas Kristen Petra Surabaya

Tanggal  
Surat Kabar / Mj  
Subyek

15 Juni 2010  
Jawa Pos

Halaman : 30  
Geografi :